



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 968–972

Penerapan Selektakapita dalam Hukum Acara Perdata Terhadap Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Akhmad Fahrurrrizkianur

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2530>

How to Cite this Article

APA : Fahrurrrizkianur , A. (2024). Penerapan Selektakapita dalam Hukum Acara Perdata Terhadap Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 968 – 972. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2530>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Penerapan Selektika Kapita dalam Hukum Acara Perdata Terhadap Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Akhmad Fahrurrrizkianur

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email Korespodensi: rizkianur12@gmail.com

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 13-12-2024

ABSTRACT

The application of selectivity in civil procedural law plays an important role in the process of resolving civil disputes in Indonesia. The selektika kapita principle allows judges to select and focus on the most relevant legal issues in a case, so that the litigation process can run more effectively and efficiently. This principle not only aims to speed up the judicial process, but also ensures that the interests of all parties involved in the dispute are fairly taken into account. Selektika kapita serves as a foundation for legal certainty and consistency in law enforcement in Indonesia. As such, its application in practice often faces challenges, such as limited access to legal resources, adaptation to social, economic and cultural dynamics, and difficulties in ensuring the enforceability of decisions in new cases. This article discusses the application of selektika kapita in civil procedure law and identifies the challenges faced in its implementation in Indonesia.

Keywords: Selektika Kapita, Civil Procedural Law, Dispute Resolution, Legal Certainty, Implementation Challenges.

ABSTRAK

Penerapan selektika kapita dalam hukum acara perdata memiliki peran penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Prinsip selektika kapita memungkinkan hakim untuk menyeleksi dan memfokuskan pada isu-isu hukum yang paling relevan dalam suatu perkara, sehingga proses litigasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, tetapi juga menjamin bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa diperhitungkan secara adil. Selektika kapita berfungsi sebagai landasan bagi kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penerapannya dalam praktik sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum, adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesulitan dalam memastikan keberlakuan putusan terhadap perkara-perkara baru. Artikel ini membahas penerapan selektika kapita dalam hukum acara perdata serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia.

Kata kunci: Selektika Kapita, Hukum Acara Perdata, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum, Tantangan Implementasi.

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata di Indonesia merupakan perangkat aturan yang mengatur tata cara bagaimana hak-hak perdata dapat ditegakkan melalui proses peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan perkara berdasarkan fakta yang diajukan oleh para pihak. Kapita selekta dalam hukum acara perdata adalah prinsip yang menetapkan bagaimana kepentingan individu atau entitas hukum dalam suatu kasus harus diperhitungkan selama proses hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus tertentu untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien. Dengan kapita selekta, dipastikan bahwa semua kepentingan yang relevan dalam kasus tersebut diperhitungkan secara seimbang dan adil selama proses hukum (Ribka, Tamariska, 2019).

Dalam praktiknya, tidak semua isu yang diajukan oleh para pihak relevan dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, prinsip selekta kapita menjadi instrumen penting dalam hukum acara perdata sebagai sarana bagi hakim untuk memilih dan memfokuskan pada isu-isu hukum yang substantif. Selekt kapita, yang secara harfiah berarti "pilihan utama", mengacu pada kemampuan hakim untuk menyaring dan menentukan isu-isu yang paling relevan dalam suatu perkara. Prinsip ini tidak hanya membantu dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan jaminan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat diperhatikan dengan adil. Prinsip ini merupakan bagian integral dari hukum acara perdata di Indonesia dan menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum serta konsistensi dalam penegakan hukum perdata.

Namun, penerapan selekta kapita dalam penyelesaian sengketa perdata tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan ini muncul dari berbagai hal, mulai dari keberlakuan putusan dalam perkara baru, adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Artikel ini akan mengkaji prinsip selekta kapita, penerapannya dalam hukum acara perdata di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini menganalisis aspek yuridis dari selekta kapita dalam hukum acara perdata dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan Data berupa studi pustaka yang digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan selekta kapita serta putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

HASIL

Selekt Kapita dalam Hukum Acara Perdata

Selekt kapita adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum acara perdata yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih dan menyeleksi aspek-aspek hukum yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga ia memiliki kewenangan untuk menentukan aturan hukum

yang tepat berdasarkan fakta yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktiknya, selekt kapita memegang peranan penting dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa kontrak, para pihak mungkin mengajukan berbagai argumentasi hukum berdasarkan banyak pasal dalam perjanjian. Namun, tidak semua pasal tersebut relevan dengan inti sengketa. Di sinilah selekt kapita berperan, dengan memungkinkan hakim untuk memilih pasal-pasal yang langsung berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang didalilkan oleh pihak pengugat.

Selain itu, selekt kapita juga memberikan hakim kemampuan untuk memastikan bahwa isu-isu hukum yang krusial tidak terabaikan, meskipun mungkin tidak diangkat secara eksplisit oleh para pihak. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, para pihak mungkin kurang memahami aspek hukum yang relevan, sehingga mereka tidak mengajukan semua argumen yang diperlukan.

Penerapan Selekt Kapita dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, selekt kapita diterapkan pada berbagai tahapan proses peradilan, mulai dari tahap pemeriksaan perkara hingga putusan akhir. Pada setiap tahap ini, hakim diharapkan mampu menyeleksi isu-isu hukum yang paling relevan dengan pokok perkara, sehingga putusan yang diambil dapat bersifat komprehensif dan adil.

a. Tahap Pemeriksaan Perkara

Pada tahap pemeriksaan, selekt kapita membantu hakim dalam menilai dan menyaring fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Hakim diharapkan dapat menentukan fakta mana yang relevan dan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Dalam hal ini, selekt kapita membantu menghindari pembahasan yang tidak perlu terhadap isu-isu yang tidak substansial. Selekt kapita juga memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan norma-norma hukum yang relevan, meskipun tidak diangkat oleh para pihak. Sebagai contoh, dalam suatu perkara sengketa tanah, hakim mungkin menemukan bahwa hak milik atas tanah tersebut sebenarnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang tidak disinggung oleh para pihak. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan selekt kapita untuk menerapkan norma hukum yang relevan.

b. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, selekt kapita membantu hakim untuk menentukan mana bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dapat mengecualikan bukti yang tidak relevan atau yang tidak mendukung pokok sengketa.

Contoh: Dalam sengketa perjanjian jual-beli, bukti yang relevan mungkin hanya sebatas dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan pembayaran, sementara bukti lain yang tidak terkait langsung dengan pelanggaran perjanjian dapat diabaikan.

c. Tahap Putusan

Pada tahap putusan, selekt kapita berperan penting dalam memastikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim cukup mendalam dan mencakup semua isu hukum yang relevan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan selekt kapita untuk memfokuskan perhatian pada beberapa aspek hukum yang dianggap paling menentukan dalam penyelesaian sengketa. Tantangan utama dalam menerapkan konsep Kapita Selekt dalam Hukum Acara Perdata mencakup berbagai aspek yang perlu diatasi untuk menjamin efektivitas dan relevansinya. Salah satu kendala utama adalah keberlakuan putusan Kapita Selekt dalam konteks perkara baru. Setiap kasus memiliki fakta dan konteks yang berbeda, sehingga relevansi putusan-putusan sebelumnya harus dievaluasi secara teliti untuk memastikan bahwa keputusan tersebut masih sesuai

dengan situasi yang ada. Selain itu, terdapat tantangan dalam menyesuaikan Kapita Selektakapita dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Kapita Selektakapita perlu diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dengan tuntutan serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Aksesibilitas dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam penerapan Kapita Selektakapita. Tidak semua putusan pengadilan mudah diakses oleh publik, terutama di wilayah-wilayah terpencil, sehingga dapat menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan Kapita Selektakapita sebagai acuan untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum acara perdata. Tantangan lainnya adalah memastikan Kapita Selektakapita digunakan dengan tepat dan tidak disalahartikan, yang menuntut adanya pendidikan hukum yang memadai bagi praktisi hukum dan hakim. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, penerapan Kapita Selektakapita dalam Hukum Acara Perdata dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keadilan serta kepastian hukum (Iriawan, A.I, 2023).

Sebagai contoh, dalam sengketa kontrak yang melibatkan banyak pasal-pasal perjanjian, hakim dapat menggunakan selektakapita untuk menilai pasal-pasal yang secara langsung terkait dengan pokok sengketa, seperti pelanggaran pembayaran atau kewajiban tertentu. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat lebih terarah dan menghindari pembahasan yang berlarut-larut terhadap hal-hal yang tidak relevan.

Tantangan dalam Penerapan Selektakapita

Meskipun selektakapita memiliki banyak manfaat, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia antara lain:

a. Keberlakuan Putusan dalam Kasus Baru

Salah satu tantangan utama dalam penerapan selektakapita adalah memastikan bahwa putusan yang diambil relevan dengan kasus-kasus baru yang muncul. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, isu-isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, hakim harus mampu menyesuaikan penerapan selektakapita dengan konteks yang terus berkembang. Setiap kasus perdata memiliki fakta dan situasi yang berbeda, sehingga hakim harus berhati-hati dalam mengevaluasi relevansi dari putusan-putusan sebelumnya terhadap kasus yang sedang dihadapi. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, isu-isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, hakim perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan penerapan selektakapita dengan konteks yang terus berkembang. Keberlakuan putusan-putusan lama dalam konteks kasus baru harus selalu dievaluasi untuk memastikan bahwa putusan tersebut masih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.

b. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti perkembangan teknologi atau perubahan pola bisnis, juga menimbulkan tantangan bagi penerapan selektakapita. Hakim harus mampu memahami dan mengadaptasi penerapan prinsip ini terhadap isu-isu yang muncul akibat perubahan tersebut. Misalnya, dalam sengketa yang melibatkan transaksi elektronik, hakim harus memahami aspek-aspek hukum yang relevan dengan transaksi tersebut, meskipun mungkin belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti perkembangan teknologi atau perubahan dalam pola bisnis, juga menimbulkan tantangan bagi penerapan selektakapita. Hakim harus mampu memahami dan mengadaptasi penerapan prinsip ini terhadap isu-isu yang muncul akibat perubahan tersebut. Sebagai contoh, dalam sengketa yang melibatkan transaksi elektronik, hakim

harus memahami aspek-aspek hukum yang relevan dengan transaksi tersebut, meskipun mungkin belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini memerlukan fleksibilitas dalam menerapkan selektakapita agar tetap relevan dalam menghadapi kasus-kasus yang muncul akibat perubahan sosial dan ekonomi.

c. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya Hukum

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum yang memadai, baik bagi hakim maupun para pihak. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin menghadapi kendala dalam mengakses informasi hukum atau doktrin yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan hakim untuk menerapkan selektakapita secara efektif. Selain itu, masalah aksesibilitas juga berlaku bagi masyarakat umum, terutama di daerah-daerah terpencil. Tidak semua putusan pengadilan mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga hal ini dapat menghambat kemampuan individu untuk memanfaatkan selektakapita sebagai panduan dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum acara perdata.

KESIMPULAN

Penerapan selektakapita dalam hukum acara perdata di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa perdata berjalan secara efisien dan adil. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk menyeleksi isu-isu hukum yang relevan dan menghindari pembahasan yang tidak perlu terhadap hal-hal yang tidak substansial. Namun, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keberlakuan putusan dalam perkara baru, adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman hakim terhadap selektakapita dan memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan perdata di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Prinsip Hukum dalam Peradilan Perdata. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mulyadi, Dedi. "Perubahan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Hukum Acara Perdata." Jurnal Hukum dan Keadilan 15, no. 2 (2018): 112-124.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2019.
- Sugiharto, Bambang. "Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata." Jurnal Hukum Ekonomi 10, no. 1 (2019): 45-56.
- Wulandari, Sri. "Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya Hukum dalam Peradilan." Jurnal Hukum dan Pembangunan 25, no. 3 (2020): 89-102.